

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Definisi Peran dan Ruang Lingkupnya.....	19
2.1.1. Definisi Peran	19
2.1.2. Konsep dan Teori Peran.....	21

2.2.	Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Ruang Lingkupnya.....	23
2.2.1.	Definisi dan Ruang Lingkup Pemerintahan.....	24
2.2.2.	Definisi Otonomi Daerah dan Ruang Lingkupnya	33
2.3.	Siyasah Dusturiyyah dan Ruang Lingkupnya	48
2.3.1.	Definisi Siyasah Dusturiyyah	48
2.3.2.	Teori dan Konsep Siyasah Dusturiyyah	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		69
3.1.	Metode Penelitian.....	69
3.2.	Sumber Data	70
3.3.	Metode Pengumpulan Data	71
3.4.	Metode Penyajian Data.....	71
3.5.	Metode Analisis Data	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		73
4.1.	Landasan Yuridis Kepastian Hukum Mengenai Wilayah Administratif Gubernur	73
4.2.	Pengelolaan Sumberdaya dan Pertimbangan Pemekaran Kewenangan dan Penghapusan Wewenang Yang Dimiliki Gubernur Sebagai Pembantu Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Daerah.....	76
4.2.1.	Peran Gubernur dalam Pengelolaan Sumberdaya pada Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	76

4.2.2. Pertimbangan Pemekaran Kewenangan dan Penghapusan Wewenang Yang Dimiliki Gubernur Sebagai Pembantu Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Daerah.....	81
4.3. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Landasan Yuridis Kepastian Hukum Mengenai Wilayah Administratif Gubernur Dan Pengelolaan Sumberdaya Dan Pertimbangan Pemekaran Kewenangan Dan Penghapusan Wewenang Yang Dimiliki Gubernur Sebagai Pembantu Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Daerah.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

